

MERETAS MASALAH PERPANGANAN DI KABUPATEN ALOR: DULU, KINI, DAN MASA MENDATANG

Robert Siburian, Soediyono, Sihol Farida Tambunan, John Haba¹

Abstract

Alor is a district in East Nusa Tenggara Province that often suffers from food shortage. Food insecurity experienced by farmer community is mainly related to two main factors, namely: geography condition and accessibility of people to food resources. Those situations have created low agricultural production, which have their close nexus with farmers' income. As a consequent, they seek of getting financial assistance, whether from government or private sectors. Some factors that are contributing to farmers low income including land infertility, farmers possession of a small plot of land, the scarcity of productivity means such as: fertilizers, the weather condition (dry season) and natural disasters. Most importantly, the limited skills of farmers to make use by all resources available factors has also impacted to food insecurity.

To overcome the current condition, any effort to establish food security mechanism through alleviation of poverty programs is recommended, for example, the revitalization of Alor local food. In the long run, any development of agricultural program in Alor Island must be carried out through intensification and extensification programs as well as accelerating aquacultural program and other alternative solutions. Strengthening the local "adat" organizations could also help farmers in particular to cope with the food insecurity, and to solve related major issues that link closely with people basic needs. The data used to write this paper are based on research conducted on September and October 2009.

Keywords: Food Security, Revitalization, and Local Food

¹ Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI. Widya Graha Lantai 6 & 9, Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan 12710.

Pendahuluan

Indonesia sudah menjadi salah satu negara pengimpor beras dunia. Periode 1986-1990 misalnya, Indonesia mengimpor beras sebanyak 105,6 ribu ton meningkat menjadi 944,6 ribu ton (1991-1995) dan melonjak ke angka 2.426,7 ton pada periode 1996-1998 (Aswatini, *et.al.*, 2004: 28). Tingginya tingkat permintaan beras belakangan ini dengan persentase 97-100% dari penduduk Indonesia adalah karena adanya perubahan makanan pokok dari non-beras ke beras di beberapa wilayah di Indonesia. Maluku, misalnya, makanan pokok penduduk di daerah ini dulunya adalah sagu, namun akhir-akhir ini konsumsi beras di daerah itu mencapai 100 persen (Harianto, dikutip oleh Aswatini, *et.al.*, 2004: 1). Demikian halnya penduduk yang tinggal di Kampung Gurusina, Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada masa nenek moyang mereka dulu, ubi merupakan bahan makanan pokok dan dianggap sebagai makanan atau sumber kehidupan. Bahkan, ubi menjadi simbol keilahian dan simbol utama dalam pesta adat *Reba*² (*Kompas*, 12/2/2008). Akan tetapi, ubi sebagai makanan pokok juga terpinggirkan oleh beras.

Masyarakat Indonesia sudah terperangkap dalam ungkapan; "kalau belum makan nasi, itu belum disebut makan". Oleh karena itu, tidak mudah untuk merubah kebiasaan itu seketika ke arah budaya bukan nasi ataupun kembali ke makanan pokok sebelumnya (Welirang, 2006: 199). Beras pun tumbuh menjadi makanan bergengsi di seluruh Indonesia, sehingga dengan pendapatan yang naik, urbanisasi yang meningkat, dan pemberian bantuan-bantuan pangan beras pada masyarakat miskin (beras miskin=raskin), akhirnya beras mendesak makanan berkalori lainnya (Birowo, Junghans, dan Scholz, 1993: 86, 92).

Pemerintah pun ikut mendorong peminggiran bahan pangan lokal itu. Hal itu tampak dari penghargaan yang diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia yang jauh lebih tinggi

²Reba merupakan upacara adat yang bertujuan untuk melakukan penghormatan dan ucapan rasa terima kasih terhadap jasa para leluhur. Upacara ini diadakan setiap tahun baru tepatnya di bulan Januari atau Februari dengan hidangan utama berupa ubi. Bagi warga Ngada ubi diagungkan sebagai sumber makanan yang tidak pernah habis disediakan oleh bumi (<http://www.kidnesia.com>).

terhadap padi (beras) dibandingkan dengan jenis tanaman pangan lainnya. Akibatnya, perhatian yang diberikan oleh kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini pun terkonsentrasi pada komoditi beras itu. Pemerintah selalu berupaya agar Indonesia kelak menjadi negara swasembada beras seperti pada dekade 80-an. Peningkatan produksi beras ini menjadi tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sejak beberapa dasawarsa (Birowo, Junghans, dan Scholz, 1993: 83). Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau beberapa jenis tanaman pangan lainnya, yang tadinya merupakan makanan pokok masyarakat di beberapa tempat di Indonesia tergusur oleh beras, baik yang ditanam di dalam maupun yang diimpor dari negeri lain. Dengan demikian, bahan pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, dan sagu kehilangan nilai sebagai pangan karena "orang kecil" pun sudah mengutamakan beras (Birowo, Junghans, dan Scholz, 1993: 92).

Mengingat ketidaktersediaan pangan menyangkut kelangsungan hidup, selain dapat menimbulkan berbagai penyakit, maka tingkat produktivitas yang rendah juga dapat menimbulkan kerawanan sosial bahkan dapat menjatuhkan sebuah pemerintahan. Itu artinya, ketersediaan pangan termasuk gizi buruk sangat menentukan keberlangsungan sebuah pemerintahan karena kedua komponen itu bila tidak terpenuhi mempunyai arti politis yang negatif bagi penguasa. Sejarah membuktikan bahwa di beberapa negara berkembang, krisis pangan dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa (Hardinsyah, *et.al.*, 1999 dikutip oleh Purwantini, Ariani, dan Marisa, t.t).

Ketercukupan pangan identik dengan ketahanan pangan. Definisi ketahanan pangan menurut FAO adalah suatu situasi di mana semua rumah tangga pada setiap saat memiliki akses (baik fisik maupun ekonomi) untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, dan sehat bagi seluruh anggota rumah tangganya (1996 dikutip Aswatini, *at.al.*, 2004: 25-27). Kemudian definisi itu diratifikasi oleh Indonesia dan menuangkannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutunya), aman, merata, dan terjangkau. Berdasarkan isi undang-undang pangan tersebut, kerawanan pangan yang terjadi di beberapa tempat merupakan pelanggaran terhadap undang-undang itu sendiri.

Ketercukupan pangan itu sangat penting karena pangan merupakan salah satu hak dasar rakyat berupa kebutuhan dasar manusia (*basic entitlement*) yang ikut menentukan kualitas hidup suatu bangsa yang dalam perwujudannya memerlukan dukungan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui aksi secara bersama baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai hak dasar maka ketercukupan pangan kemudian dideklarasikan sebagai salah satu hak asasi manusia tahun 1948 artikel 11(1) yang menyatakan bahwa: "setiap orang mempunyai hak atas kehidupan standar yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan...". Artinya, hak asasi ini menekankan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk tidak kelaparan dan mempunyai akses terhadap makanan yang cukup, bergizi, dan aman bagi tubuhnya. Kekurangan pangan dapat menyebabkan kekurangan gizi yang berakibat buruk bagi kesehatan (Rungkat, 2006: 240).

Masalah ketahanan pangan memiliki keterkaitan dengan banyak faktor, dan salah satu faktor dominan adalah kemiskinan, baik yang dikelompokkan dalam "miskin kronis" maupun "miskin transisi". "Miskin kronis" adalah masyarakat atau orang miskin sesungguhnya tidak dapat keluar dan mampu beranjak dari kondisi miskinnya, sedangkan "miskin transisi" dapat dimaknai sebagai perubahan yang terjadi baik secara gradual maupun tiba-tiba, sehingga seseorang atau sekelompok orang terjatuh dalam lingkaran kemiskinan, seperti bencana alam, kelaparan, ketiadaan mata pencaharian, sakit, dan faktor lainnya. Dua jenis kemiskinan ini berdampak pada ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terbatas ataupun tidak memiliki fasilitas dan potensi bahkan akses sama sekali untuk menghidupkan dirinya menjadi faktor dominan bagi lemahnya ketahanan pangan masyarakat, sebab sumber-sumber subsistensi yang sangat minim ataupun tidak dimiliki. Dasar perhitungan garis kemiskinan adalah kebutuhan dasar kalori minimal 2.100 kkal, dengan pertimbangan 24% dari 2.100 kkal tersebut berasal dari beras, maka jika harga beras naik, kebutuhan uang untuk membeli beras juga akan bertambah, sehingga garis kemiskinan akan bergeser ke atas (<http://www.et-neg.go.id/index.php?:2>, diakses tanggal 15 Nopember 2009).

Masalah ketahanan pangan di Indonesia termasuk di Provinsi NTT dan provinsi lainnya sangat berkaitan dengan kebijakan pangan. Mengurangi perhatian dan program pembudidayaan tanaman lokal

seperti sagu, jagung, dan ubi kayu, kemudian pola makan (*food habit*) yang terpusat pada beras telah merusak daya tahan pangan lokal yang berlangsung sejak era Orde Baru. Pangan selalu dihubungkan dengan beras, sehingga daerah-daerah yang produksi berasnya rendah 'melarikan diri' dari peningkatan produksi lokal yang khas (jagung, sagu, dan ubi kayu tadi) dan beralih ke beras. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan yang diterapkan pemerintah selama tiga dekade yang telah membentuk persepsi masyarakat bahwa beraslah yang menjadi indikator pokok ketika isu tentang pangan diwacanakan.

Lemahnya pembangunan pertanian dan kebutuhan pangan yang hanya bersumber dari beras bermuara pada rentannya ketahanan pangan suatu bangsa sehingga mengarah pada terjadinya kelaparan. Penganekaragaman pangan merupakan salah satu cara menghindari ketergantungan kepada beras dan melepaskan diri dari permainan para tengkulak, termasuk usaha untuk kembali mengonsumsi makanan pokok yang sebelumnya ditinggalkan akibat hegemoni komoditi beras yang menguasai seluruh masyarakat Indonesia. Namun, usaha penganekaragaman pangan itu tidak akan berhasil tanpa dukungan politik dan sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan elemen-elemen terkait. Untuk itu, yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah (a) Mengapa kerawanan pangan dapat terjadi di Kabupaten Alor; (b) Bagaimana strategi pemerintah kabupaten dan implementasi kebijakan itu terkait dengan kerawanan pangan yang terjadi di daerah itu?; (c) Bagaimana masyarakat lokal dalam menghadapi kerawanan pangan yang terjadi di daerahnya, dan dukungannya terhadap usaha meningkatkan ketahanan pangan?

Potensi Lahan Pertanian di Kabupaten Alor

Salah satu daerah yang mengalami kerawanan pangan di Indonesia adalah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data Pemerintah Provinsi NTT tahun 2005 mencatat bahwa dari 174 desa yang ada di seluruh Kabupaten Alor, hanya 8 desa (5%) saja yang relatif aman dari resiko rawan pangan. Padahal lahan di Kabupaten Alor ini relatif luas, yaitu 136.237,88 hektar (ha) lahan kering dan 3.354,5 ha lahan basah. Namun lahan-lahan tersebut tidak seluruhnya dikelola oleh masyarakat, sebab data tahun 2003 menunjukkan lahan kering yang dimanfaatkan untuk memproduksi padi ladang, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar hanya 22.439 ha saja. Artinya, sekitar 113.798,88 (84%) lagi lahan tidak dimanfaatkan secara maksimal atau ditelantarkan. Demikian

halnya dengan lahan basah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sangat sedikit, yaitu hanya 183 ha saja. Produksi padi sawah dan lahan kering sekitar 8.752,50 ton (BPS Kab. Alor, 2003). Bila volume produksi padi itu dikonversikan dengan angka 0,632³ maka jumlah padi tersebut setara dengan 5.531,58 ton beras. Kalau konsumsi beras per kapita adalah sekitar 148 kilogram maka kebutuhan beras untuk dikonsumsi oleh penduduk di Kabupaten Alor yang jumlahnya 171.187 jiwa (2004) kurang lebih 25.335,68 ton per tahun. Hal itu berarti bahwa produksi beras Kabupaten Alor hanya mampu memenuhi sekitar 22% saja akan kebutuhan beras penduduk di kabupaten tersebut. Sisa kebutuhan beras sekitar 78% harus didatangkan dari daerah lain. Kondisi ini mengakibatkan Kabupaten Alor rentan terhadap kerawanan pangan terutama dari sisi ketersediaan beras.

Kabupaten Alor merupakan salah satu dari 21 kabupaten/kota di Provinsi NTT, letaknya berada di bagian utara dan ujung timur NTT. Kabupaten Alor merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 20 pulau.⁴ Kabupaten Alor dengan pulau-pulaunya itu terletak membujur dari timur ke barat pada posisi 123°48' – 125°8' BT dan 8°6'-8°36' LS, dan secara wilayah administrasi dibagi menjadi 17 kecamatan, 158 desa, dan 17 kelurahan. Kabupaten Alor sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Maluku Tenggara Barat, sebelah barat berbatasan dengan Selat Lomblen, Kabupaten Lembata, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, dan sebelah selatan berbatasan dengan Selat Ombay dan Timur Leste (http://www.nttprov.go.id/ntt_09/index.php?hal=kabalar, diakses tanggal 5 September 2009).

Kondisi geografi Kabupaten Alor bergunung-gunung dan memberikan variasi iklim yang berbeda sehingga sangat menguntungkan bagi daerah dan rakyat dalam pengembangan tanaman produksi (http://www.nttprov.go.id/ntt_09/index.php?hal=kabalar, diakses tanggal 5 September 2009). Luas tanah dengan tingkat kemiringan 00-01 derajat seluas 100,98 hektar atau hanya sekitar 3,53% dari wilayah Kabupaten Alor yang luasnya mencapai 2.864,64 ha. Sementara tingkat kemiringan tanah

³Setiap satu kilogram padi menghasilkan sekitar 0,632 kilogram beras.

⁴Pulau-pulau di Kabupaten Alor 9 pulau di antaranya telah dihuni oleh penduduk, yakni Pulau Alor, Pantar, Pura, Tereweng, Ternate, Kepa, Buaya, Kange dan Kura. Sementara 11 pulau lainnya tidak berpenghuni, masing-masing, Pulau Sikka, Kapas, Batang, Lapang, Rusa, Kambing, Watu Manu, Bawa, Batu Ille, Ikan Ruing, dan Nubu.

antara 02-15 derajat mencapai 249,58 ha atau sekitar 8,71%. Karena topografi tanah dari kedua kelompok kemiringan ini merupakan lahan yang relatif datar, mengakibatkan daerah ini menjadi tempat permukiman penduduk. Lokasinya pun berada di sepanjang pesisir, hal itu tampak juga dari tingkat kepadatan rumah-rumah penduduk di wilayah pesisir yang relatif tinggi. Adapun tanahnya memiliki kemiringan relatif tinggi sehingga kurang cocok dijadikan sebagai lahan pertanian kecuali dengan membuat teras-teras untuk mencegah terjadinya erosi jauh lebih luas, yaitu pada tingkat kemiringan 15-40 derajat seluas 682,29 ha (23,82%), dan tanah yang lebih terjal lagi dengan kemiringan 40 derajat lebih seluas 1.831,79 ha (63,94%) (BPS Kabupaten Alor, 2008).

Potensi utama daerah pertanian di Kabupaten Alor adalah jagung, kacang tanah, kedelai, padi, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, jambu mete, kenari, dan kemiri. Potensi ini sebagian besar untuk dikonsumsi dan hanya sebagian kecil saja yang dijual untuk membeli kebutuhan lain yang tidak dapat mereka produksi. Untuk menjaga tingkat produksi dan keberlanjutan produksi pertanian, maka dibentuk kelompok-kelompok kerja. Salah satu kelompok kerja bernama Kelompok Penanam Sayur di Desa Lewola, yaitu kelompok yang berada di desa dengan sumber daya air yang kurang, menjadi contoh bagaimana anggota kelompok sulit air itu dapat bekerjasama dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Pola kerjasama antaranggota yang dibantu oleh “Yayasan Citra Hidup dan Alfa Omega” ini dapat menghasilkan bahan makanan guna menunjang upaya meningkatkan ketahanan pangan di desa tersebut (Haba, 2009: 172).

Realitas Perpanganan di Provinsi NTT dan Kabupaten Alor

Provinsi NTT merupakan daerah yang belum mandiri dalam ketersediaan pangan, sebab untuk memenuhi kebutuhan pangan sekitar 4.534.319 jiwa penduduk NTT tahun 2008, pemerintah provinsi harus mendatangkan beras dari daerah lain seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi. Walaupun pemerintah provinsi sudah mencoba untuk meningkatkan produksi beras, peningkatan itu kurang signifikan. Selain persentasenya kecil, juga akibat adanya penambahan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang sudah berubah dari beras ke non-beras. Pertumbuhan penduduk NTT rata-rata dalam lima tahun terakhir sekitar 1,98%, namun pertumbuhan produksi padi rata-rata dalam kurun waktu yang sama hanya 1,73% (*Leaflet* BPS

Provinsi NTT, 2009). Fenomena itu menunjukkan pertumbuhan produksi padi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang bertambah.

Perkiraan kebutuhan konsumsi beras bagi 4.619.700 jiwa penduduk NTT tahun 2009 adalah sekitar 507.368 ton, sedangkan dari perkiraan produksi padi sebesar 595.872 ton gabah giling kering (GKG), yang ekuivalen dengan hasil beras baru sekitar 331.803 ton (*Leaflet* BPS Provinsi NTT, 2009). Tentu, perkiraan ini mengabaikan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan berkurangnya hasil produksi padi ataupun gagal panen akibat kekeringan, hama, dan banjir. Perbandingan antara produksi beras dengan kebutuhan beras, diperoleh bahwa kebutuhan untuk konsumsi beras di NTT masih kurang sekitar 175.565 ton.

Sementara tahun 2008, produksi tanaman padi Provinsi NTT mencapai 577.986 ton GKG, yang terdiri atas 440.909 ton GKG berasal dari produksi padi sawah dan 136.896 ton GKG padi ladang. Pada tahun itu, produktivitas tanaman padi sawah Kabupaten Alor yang mencapai 50,72 kwintal per hektar merupakan yang tertinggi dari kabupaten lain, termasuk untuk produktivitas tingkat Provinsi NTT sebesar 34,78 kuintal per hektar. Walaupun produktivitas tanaman padi di Kabupaten Alor tertinggi di Provinsi NTT, sebenarnya tingkat produksi padi itu masih dapat ditingkatkan lagi untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Sementara dari sisi ekstensifikasi relatif sulit dilakukan karena tingkat kemiringan tanah di Alor begitu tinggi.

Jumlah produksi padi/beras di Provinsi NTT berasal dari kegiatan pertanian di lahan basah (sawah) maupun di lahan kering (ladang) dengan luas panen sekitar 187.907 ha (bandingkan: luas tanam adalah 197.267 ha).⁵ Hasil produksi padi per hektarnya adalah 3,6 ton/ha. Tingkat produksi per hektar itu dikategorikan rendah karena tingkat produktivitas maksimal padi dapat mencapai 8 ton/ha GKG. Namun, karena proses pertanian yang dilakukan oleh petani di NTT masih menggunakan cara tradisional mengakibatkan hasil yang diperoleh pun jauh dari pencapaian maksimal itu. Petani di NTT belum memelihara tanaman padinya dengan baik, tidak menggunakan pupuk,

⁵Selisih luas tanam dengan luas panen sekitar 9.360 ha menunjukkan bahwa tanaman padi yang gagal panen cukup luas, baik yang diakibatkan oleh angin maupun hewan yang menjadi hama bagi tanaman padi seperti tikus.

dan belum menyempromot hama yang menyerangnya. Kemiskinan menjadi salah satu penyebabnya, karena petani tidak mempunyai modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Selain itu, penggunaan waktu pun belum maksimal, dan mentalitas petani yang terlalu cepat puas terhadap hasil yang diperoleh. Petani beranggapan bahwa hasil yang diperoleh sudah cukup untuk kebutuhan setahun. Realitas ini akibat proses produksi yang dilakukan oleh petani tidak berorientasi pasar tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan keluarga.⁶ Berdasarkan realitas yang demikian, mereka masih hidup dengan ekonomi subsisten. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, mereka puas dengan kondisi ekonomi subsisten tersebut.

Penyediaan pangan yang masih harus didatangkan dari luar daerah akibat ketidakmampuan petani berproduksi menjadi salah satu indikator kerentanan ketahanan beras di NTT. Kondisi itu diperparah oleh pemerintah yang turut memberikan kontribusi terhadap munculnya ketergantungan itu, melalui kebijakan yang "memaksa" penduduk NTT untuk mengonsumsi beras. Kebijakan itu seakan mengasumsikan kalau orang makan sagu atau jagung seolah-olah mereka itu merupakan warga kelas dua. Padahal tanah di NTT tidak cocok untuk ditanami padi, tetapi untuk ditanami jagung dan sagu (Musakabe 2009, dikutip dari Tempointeraktif 04/09/2007).

Pola Pertanian dan Kecenderungan Masyarakat Alor

Menurut peta zona agro ekologi (ekologi pertanian) Provinsi NTT, lahan di Kabupaten Alor secara keseluruhan merupakan campuran lahan tanaman pangan dan perkebunan, terdiri dari gugusan kepulauan. Dataran rendah adalah wilayah pesisir pantai dan dataran tinggi berupa pegunungan. Kondisi topografi seperti itu merupakan salah satu penghambat untuk menjangkau daerah pegunungan guna mengambil produksi pertanian dan perkebunan. Bahan pangan yang dihasilkan di suatu desa tidak mudah dijual ke desa lain akibat jarak yang jauh dan biaya transportasi yang tinggi. Para petani harus naik-turun gunung untuk menjual hasil pertaniannya. Kalau hasil pertanian ingin dijual ke pulau lain maka ia harus menggunakan perahu dengan ongkos yang lebih tinggi lagi. Akumulasi dari jarak yang jauh dan biaya transportasi yang tinggi berdampak pada harga jual produk yang mahal sehingga

⁶Wawancara dengan sekretaris Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.

masyarakat yang ingin membeli pun menjadi kesulitan untuk memperolehnya.

Sebenarnya, tanah di Kabupaten Alor kendati topografinya berbukit-bukit dan bergunung-gunung relatif lebih subur dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi NTT. Tanaman sayur-sayuran dan perkebunan tumbuh subur di wilayah kepulauan ini dan hasilnya sangat baik walaupun tidak dipupuk. Namun, cuaca yang tidak baik untuk pertanian sering membuat hasil pertanian tidak maksimal, ditambah pengetahuan petani Alor yang terbatas untuk menerapkan cara bertani yang baik. Mereka hanya menggantungkan hasil pertanian kepada kemurahan alam.

Biasanya, pada akhir musim kemarau petani dengan segera akan menanam jagung agar pada saat hujan tiba, tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik. Pada saat musim kemarau kembali tiba, diharapkan tanaman jagung itu sudah berbuah dan dapat dipetik untuk persediaan makanan selama musim kemarau. Apabila petani Alor terlambat menanam jagung yang berakibat hasil panen berkurang, mereka akan mengubah menu makanan dengan memakan umbi-umbian yang diperoleh dari tanaman di ladang. Sekiranya mereka masih mempunyai uang, barulah beras dibeli di toko kalau padi ladang pun sudah tidak ada lagi.

Pola pikir masyarakat dalam bercocok tanam pun masih dipengaruhi oleh mitos. Dengan kepercayaan terhadap mitos yang ada di tengah masyarakat petani, maka luas lahan yang akan ditanami oleh seorang petani tergantung pada tahun saat panen, yang dikenal dengan istilah "tahun genap dan tahun ganjil". Oleh karena petani di Alor lebih banyak bertani tadah hujan maka masa tanam pun dilakukan pada musim hujan, yang jatuh pada bulan Nopember. Hasil tanam itu dipanen pada bulan Februari atau Maret tahun berikutnya. Kalau masa panen itu jatuh pada tahun genap maka lahan yang diusahakan untuk dapat dipanen di tahun genap tersebut jauh lebih luas dibandingkan kalau masa panen jatuh pada tahun ganjil. Masyarakat percaya bahwa masa panen di tahun ganjil tidak akan maksimal karena pada tahun ganjil banyak tikus yang menyerang tanaman petani. Dengan mitologi yang berkembang sedemikian rupa mengakibatkan petani tidak ada yang berani untuk menanam pada lahan yang luas karena diyakini ia akan mengalami kerugian nantinya. Adapun masa tanam pada tahun genap itu hanya diperuntukkan guna mendapatkan bibit. Dengan demikian,

secara sederhana dapat dijelaskan bahwa masa tanam petani sebenarnya hanya sekali dalam dua tahun, sehingga dapat dimaklumi potensi rawan pangan di Kabupaten Alor relatif tinggi.

Tampak bahwa sifat fatalistik dari kalangan petani begitu tinggi. Mereka tidak mencoba untuk membasmi keberadaan hama tikus yang muncul pada tahun ganjil itu dengan cara meracunnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah meracun tikus tidak ada manfaatnya, karena ketika tikus diracun justru populasinya akan semakin besar. Walaupun pantangan untuk membunuh tikus tidak ada, namun karena gejala itu sudah merupakan kehendak alam sehingga mereka pun membiarkan hama tikus menyerang tanaman petani tanpa ada upaya untuk menanggulangnya. Hal yang dilakukan untuk menghindari serangan tikus yang begitu banyak pada tahun ganjil adalah dengan tidak menanam komoditi pangan jenis apapun pada lahan yang luas.

Sebenarnya, instansi yang membidangi ketahanan pangan menyadari kebiasaan yang keliru dari para petani ini. Dijelaskan bahwa masa panen tahun genap memungkinkan tikus-tikus meningkatkan populasinya karena ketersediaan makanan yang cukup. Walaupun pada masa itu populasi tikus relatif banyak tetapi karena lahan yang ditanam petani begitu luas sehingga padi yang dihasilkan pun masih relatif banyak. Berbeda dengan masa panen pada tahun ganjil. Populasi tikus yang begitu banyak pada masa panen ditahun genap membutuhkan makanan yang banyak juga. Oleh karena masa tanam petani sudah terpola dengan *common sense* yang diperoleh secara turun temurun, mengakibatkan hasil panen dari lahan sempit itu masih harus dibagi dengan kebutuhan pangan dari populasi tikus yang begitu banyak, sehingga bagian untuk petani pun menjadi sedikit. Realitas inilah yang dipahami oleh petani Alor sebagai sebuah kepercayaan, yang apabila dilakukan akan mengalami kerugian, sehingga harus dihindari.

Menurut koordinator pegawai PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kecamatan Alor Barat Daya, fenomena yang dipercaya oleh kebanyakan masyarakat Alor seperti sudah diuraikan, sebenarnya bukan sebuah mitos karena dapat dijelaskan secara ilmiah. Ketika musim hujan turun tidak pada waktunya, jagung yang ditanam akan lebih cepat memasuki musim kemarau dari yang seharusnya. Ketika hujan turun lebih awal sementara petani belum melakukan persiapan untuk masa tanam pada waktu itu, akibatnya waktu untuk menanam jagung menjadi lebih lama. Pada waktu itupun, musim kemarau akan lebih cepat tiba

dari biasanya sehingga waktu tanaman jagung menjadi lebih pendek dari yang biasanya. Karena usia tanaman jagung relatif pendek mengakibatkan bulir jagung tumbuh dengan jarak yang lebih dekat ke tanah dari biasanya. Jarak bulir jagung dengan tanah yang berdekatan sehingga tikus berukuran baik kecil maupun besar menjadi lebih leluasa untuk memakan jagung. Ironisnya, walaupun fenomena tahun tikus dan tahun tidak tikus sudah dijelaskan sedemikian rupa, petani masih saja banyak yang tidak menerimanya. Tahun tikus masih dipercayai sebagai realitas yang harus dihindari agar tidak mengalami kerugian.

Indikator mengapa hama tikus banyak berkeliaran di lahan-lahan petani dapat juga dicermati dari lokasi lahan pertanian yang bersebelahan dengan hutan belantara. Hutan belantara itu menjadi sarang-sarang tikus yang menyerang tanaman petani. Selain itu, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tahun tikus dan tahun tidak tikus belum seragam sehingga petani yang berani untuk membuka ladang di tahun ganjil adalah mereka yang tidak percaya terhadap mitos tersebut, tetapi jumlahnya relatif sedikit. Akibatnya, tanaman jagung yang diserang oleh tikus pun relatif sedikit, mengakibatkan tanaman jagung yang diserangnya pun lebih cepat habis. Berbeda dengan lahan pertanian yang ditanam dalam hamparan yang luas, tikus pun akan menyebar dan tidak berkonsentrasi pada sebidang lahan jagung saja. Artinya, petani yang tidak percaya terhadap tahun tikus ini tidak berbagi kerugian dengan petani lain yang mengalami kerugian akibat serangan tikus ini hanya ia sendiri. Oleh karena itu, walaupun ia sebenarnya tidak percaya dengan mitos tersebut namun untuk menghindari kerugian yang akan ditanggungnya sendiri, ia pun menjadi ikut-ikutan tidak membuka lahan dalam jumlah besar pada tahun ganjil tersebut.

Upaya untuk membongkar mitos yang merugikan petani itu sudah pernah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Alor tahun 1996. Selain bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama agar kepercayaan yang keliru itu dapat diluruskan melalui pendekatan keagamaan, di tingkat implementasi pun harus dilakukan dengan membuat proyek percontohan di Desa Silaebile. Proyek percontohan ini didukung oleh Kepala Desa Silaebile yang juga merangkap sebagai seorang pendeta. Selama proyek percontohan itu dilakukan, ternyata apa yang selama ini dipercayai oleh masyarakat terkait dengan tahun ganjil dan tahun genap itu tidak terbukti. Dengan kata lain, hasil yang diperoleh dari proyek percontohan ini relatif besar. Walaupun ada gangguan tikus, jumlah kerugian yang diakibatkannya masih dalam tingkat yang wajar.

Sayangnya, proyek seperti ini tidak mendapat dukungan pada tingkat kecamatan karena cara berpikir mereka masih tetap diliputi kepercayaan "tahun genap dan tahun ganjil". Setelah kepala desa yang juga sang pendeta ini berhenti sebagai kepala desa karena masa tugas sudah berakhir dan ia kembali sepenuhnya kepada panggilan pelayanannya di tempat lain mengakibatkan kepercayaan terhadap mitos "tahun genap dan tahun ganjil" masih tetap menjadi ganjalan dalam mengembangkan produksi pertanian.

Hal lain yang menjadi kendala untuk meningkatkan produksi pertanian adalah semakin rendahnya persediaan sumberdaya manusia (SDM) di bidang pertanian. Orang lebih berminat pada sektor-sektor yang cepat memberikan penghasilan, seperti tukang *ojek*. Orang-orang yang bergerak di bidang pertanian yang berada di desa-desa adalah mereka yang tidak lagi tergolong muda sehingga dari kemampuan yang dimiliki sudah tidak lagi maksimal. Dengan semakin sedikitnya SDM di bidang pertanian mengakibatkan banyak lahan yang tidak dikelola, di samping waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas pertanian tidak begitu maksimal. Petani dalam melakukan aktivitasnya rata-rata dimulai jam 8 sampai 10 pagi, kemudian istirahat dan berlanjut lagi pada sore harinya, dari jam 15 sampai jam 17 WITA (Waktu Indonesia Tengah).

Minimnya sumber daya manusia di bidang pertanian akibat bergesernya lapangan kerja yang diminati oleh anak-anak muda perdesaan. Mereka cenderung bekerja pada sektor-sektor informal seperti menjadi tukang ojek daripada menjadi petani. Selain itu ada yang merantau ke daerah lain terutama ke Pulau Batam. Pilihan anak muda perdesaan ini mendapat dukungan dari orang tuanya, sebab tidak jarang hasil pertanian dijual kemudian dijadikan sebagai uang muka membeli sepeda motor. Sepeda motor ini menjadi modal awal si anak sebagai tukang ojek. Kondisi kekurangan tenaga kerja ini tidak disiasati oleh petani dengan mempercepat masa pengolahan tanah dari yang biasanya mereka lakukan. Pengolahan tanah baru dilakukan menjelang musim hujan, padahal seiring dengan berkurangnya tenaga kerja, pengolahan lahan pertanian seharusnya sudah dilakukan sekitar bulan Juli agar lahan yang dapat digarap lebih luas. Namun, karena penggarapan lahan baru dilakukan sekitar bulan September atau Oktober mengakibatkan lahan-lahan yang siap untuk ditanam menjelang musim hujan hanya sedikit, yang berakibat hasil pertanian yang diperoleh pun sedikit. Selain luas lahan yang dikerjakan tidak begitu

luas, petani pun hanya mengandalkan tingkat kesuburan tanah semata karena petani tidak menggunakan pupuk dalam melakukan proses produksi.

Budaya Konsumtif dan Kegemaran Berpesta

Kemiskinan menjadi salah satu penyebab rentannya masyarakat Alor terhadap rawan pangan. Namun kontradiksi dengan itu, budaya konsumtif terus berlangsung seakan tidak dapat dihentikan. Budaya konsumtif itu diwujudkan dalam bentuk pesta-pesta. Kebiasaan itu dikategorikan oleh banyak orang sebagai budaya boros dan menjadi faktor penyebab miskinnya penduduk di beberapa tempat di Pulau Alor. Budaya pesta telah menyebabkan sumber daya ekonomi masyarakat banyak tersedot untuk membiayai kegiatan pesta. Jenis pesta yang diadakan oleh masyarakat Alor tidak pandang bulu karena hampir seluruh peristiwa kemanusiaan dipestakan, mulai dari kelahiran, sunatan, pernikahan sampai meninggal dunia. Tidak itu saja, pesta pun diadakan untuk membuat atap rumah, panen, dan berbagai peristiwa lainnya. Bahkan, sekedar untuk merayakan kemenangan dari pertandingan sepak bola di tingkat desa pun pesta diadakan oleh orang Alor.⁷ Hari-hari keagamaan juga tidak luput dari kegiatan pesta, baik yang diadakan oleh umat Kristen maupun umat Islam. Dalam pesta keagamaan ini, umat yang berbeda agama saling mengundang untuk hadir sebagai bentuk toleransi keagamaan di antara mereka.⁸

Kendati pesta bagi banyak kalangan dikategorikan sebagai bentuk pemborosan yang berakibat tidak terjadinya pengakumulasian modal, namun bagi masyarakat di Desa Alila misalnya, pesta sebenarnya dimaknai tidak sekedar makan bersama. Lebih dari itu, pesta adalah kesempatan untuk berkomunikasi sesama anggota masyarakat dan arena untuk bergembira bahkan dapat dimaknai juga sebagai tempat untuk mendapatkan asupan gizi yang lebih baik. Ketika pesta diadakan,

⁷Dengan maraknya budaya pesta, kemenangan pertandingan sepak bola antardusun pun harus diselenggarakan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Dusun Bota. Pertandingan ini dimainkan oleh 3 (tiga) kesebelasan dari tiga dusun yang ada di Desa Alila. Makanan yang dihidangkan dalam pesta adalah berbagai macam kue, nasi, dan lauk sederhana.

⁸Pesta-pesta keagamaan yang dimaksud antara lain sunatan, akikah, lebaran, dan lebaran haji bagi masyarakat Islam, sedangkan pesta keagamaan umat Kristen adalah Natal.

tokoh masyarakat didaulat untuk menyampaikan kata sambutan. Menurut kepala Desa Alila, pesta merupakan budaya bagi masyarakat. Seseorang justru merasa malu apabila ia tidak sanggup mengadakan pesta. Oleh karena kegiatan pesta sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat sehingga ada satu kepala keluarga di Dusun Bota, Desa Alila ini mengalami sakit jiwa karena ia tidak mampu mengadakan pesta.

Oleh karena pesta sudah membudaya di kalangan masyarakat terutama di Desa Alila ini, maka setiap keluarga biasanya mendapat giliran untuk mengadakan pesta. Mereka mendaftarkan diri kepada kepala desa untuk mendapat giliran sebagai penyelenggara pesta. Dengan seringnya kegiatan pesta, kepala desa harus memiliki catatan jadwal dan nama warganya yang akan mengadakan pesta dalam seminggu. Hal itu diperlukan agar warga yang melaksanakan pesta tidak dalam waktu bersamaan. Selain membebani warganya, pesta yang dilaksanakan secara bersamaan pun menjadi kurang meriah karena undangan akan terbagi.

Pada saat pesta berlangsung, hidangan makanan yang disajikan tergantung besar kecilnya pesta. Kalau untuk pesta kecil, seperti menyambut kemenangan pertandingan sepak bola antardusun, makanan yang dihidangkan untuk para tamu lebih sederhana dibandingkan dengan pesta besar. Pada saat pesta ini, mereka hanya makan kue-kue dan makanan sederhana lainnya. Adapun nasi yang dihidangkan adalah nasi beras dan bukan jagung. Untuk mempersiapkan keperluan pesta, para tamu bergotong royong menyediakan makanan yang akan dihidangkan dengan membawa bahan mentah seperti beras, gula, dan kopi dari rumah masing-masing.

Mengingat pesta sudah membudaya maka kesenangan berkumpul dan makan bersama ini diciptakan masyarakat dalam berbagai peristiwa. Mereka hanya ingin menyalurkan kegemaran makan dan berkumpul bersama. Namun pada saat mengadakan pesta besar, penyelenggara pesta akan berusaha untuk menghidangkan daging pada jamuan makannya. Oleh karena itu, terkadang mereka meminjam uang dari rentenir agar dapat membeli daging dan kebutuhan pesta lainnya. Undangan yang datang ke pesta tidak membawa amplop berisi uang karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki uang. Biasanya masyarakat membawa bahan makanan seperti beras, jagung, mie, kue, dan bentuk natura lainnya. Ketika undangan kembali ke rumah setelah

pesta usai, penyelenggara pesta akan memberikan makanan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Pada saat pesta kematian ada juga pemotongan hewan dan dagingnya diberikan kepada tamu yang datang.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Pangan

Berbagai program kegiatan guna meningkatkan produksi pertanian telah ditempuh pemerintah. Pengembangan usaha tani di daerah perbukitan lahan kritis dilakukan dengan merehabilitasi lahan dan penerapan sistem terasering. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, pemerintah juga mengintroduksi sejumlah tanaman *leguminosae* atau *multi purpose trees*, agar secara ekonomi tingkat pendapatan masyarakat diharapkan dapat naik, dan secara ekologi kemampuan daya dukung lingkungan dapat pula meningkat.

Usaha rehabilitasi lahan kritis sudah berlangsung lama, yaitu dilakukan pada tahun 1982-1983. Usaha rehabilitasi itu antara lain pembuatan terasering dan penanaman lamtorogung. Pembuatan terasering ini penting mengingat lahan-lahan pertanian di Kabupaten Alor berada di punggung-punggung perbukitan dengan tingkat kemiringan lebih dari 40 derajat. Sementara lamtorogung, di samping berguna untuk penahan erosi, buah dan biji lamtorogung juga bermanfaat sebagai bahan sayur-sayuran. Selain sifat perakarannya yang mampu menahan erosi, tanaman ini dipilih juga karena mudah tumbuh pada lahan kritis dan daunnya dapat digunakan sebagai pakan ternak. Hasil dari kegiatan ini adalah tumbuh dan lebatnya tanaman lamtorogung di sepanjang jalan Dusun Beharuin menuju Dusun Tulta kurang lebih 5 km.

Tahun 1997/1998, upaya meningkatkan produksi pertanian juga telah dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pelatihan secara intensif, meliputi pembuatan areal percontohan (*demplot*) pertanian seluas 0,5 ha berlokasi di Dusun Bota. Masyarakat mengakui bahwa kegiatan penyuluhan pertanian dan peternakan cukup aktif dilakukan pada saat itu. Untuk menambah pengetahuan di bidang lain, di antara peserta ada yang diikutsertakan untuk mengikuti studi banding tentang pengembangan usaha ternak ayam buras di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Tahun berikutnya yaitu tahun 1999–2002, UNDP melakukan proyek pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, dan usaha perbengkelan. Sejumlah kelompok tani (pokmas) dibentuk,

dan kegiatan pelatihan telah diselenggarakan. Manfaat langsung yang dirasakan petani dalam kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan di bidang elektronika. Dengan berbekal keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan perbengkelan itu, salah seorang warga desa telah membuka usaha bengkel motor. Langgan bengkel ini adalah para pemilik sepeda motor, dengan jumlah sepeda motor mencapai 30 unit.

Pada tahun 2004, pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Alor juga telah menyalurkan subsidi pupuk merk TSP sebanyak 50 kg, urea 50 kg, dan bantuan bibit jagung varietas bisma sebanyak rata-rata 5 kg per ha. Varietas bibit ini diterima masyarakat karena keunggulannya yang tahan terhadap kekeringan dan serangan hama belalang. Tahun 2005 pun, melalui program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), Dinas Kehutanan memperkenalkan pengembangan tanaman jambu mete seluas 25 ha. Bantuan bibit diberikan kepada 25 orang petani, di mana masing-masing petani menerima 100 bibit pohon jambu mete. Kini, tanaman jambu mete hasil dari kegiatan tersebut sudah mulai berbunga.

Pada tahun itu juga, pemerintah melalui Program Nasional Pengembangan Energi Alternatif mengembangkan tanaman jarak seluas 25 ha berlokasi di Luitbang, Desa Alila. Program yang melibatkan petani sebanyak 25 orang ini, kemudian memperoleh pembekalan menyangkut teknik budidaya tanaman jarak di Gedung Golkar Kabupaten Alor tahun 2007. Program ini juga sudah mempersiapkan mesin pemroses buah jarak di Gedung Yayasan Undala Kabupaten Alor. Gedung pengolahan jarak juga sudah dibangun di Kokar. Akan tetapi, kelanjutan dari program nasional itu hingga penelitian ini dilakukan (2009) tidak jelas. Akibatnya, petani sudah menebang hampir semua tanaman jarak yang ada karena tanaman tersebut menaungi tanaman pangan.

Pada tahun 2007, pengembangan tanaman jambu mete kembali dilakukan di lahan seluas 30 ha di Dusun Beharuin atas swadaya masyarakat sendiri. PT Fores Syammil Group di Jakarta bertindak sebagai bapak angkat sekaligus penampung hasil buah mete. Usaha ini juga bekerja sama dengan LIPI, terutama dalam penerapan teknologi tepat guna pengolahan produk pasca panen. Wujud kerja sama itu berupa bantuan mesin pengupas jambu mete (kacip) sebanyak 2 unit.

Produksi olahan biji jambu mete dalam setahun baru mencapai 500 kg. Olahan jambu mete ke depannya sedang dirancang, seperti

pembuatan minuman sirup, abon, dan pengolahan minyak jambu mete. Usaha rintisan pengolahan biji jambu mete telah menyerap 7 orang pekerja. Pengembangan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) ini mendapat bantuan modal dari program kegiatan *agroprocessing* sebesar Rp25 juta melalui Pokmas Semangat Baru yang beranggotakan sebanyak 15 orang.⁹ Tahun 2007 juga, Dinas Perindustrian bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi NTT telah melakukan pembuatan tambak garam di Dusun Bota. Proyek ini bertujuan untuk menanggulangi penyakit gondok yang banyak diderita masyarakat akibat kekurangan yodium dalam menu makannya.

Pada tahun anggaran 2008, Dinas Sosial Provinsi NTT kembali melaksanakan program melalui kegiatan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pokmas yang sudah terbentuk untuk Desa Alila sebanyak 9 kelompok, dengan anggota untuk masing-masing pokmas 10 orang. Sosialisasi menyangkut pembinaan kelembagaan pokmas, keterampilan berorganisasi, penguasaan administrasi kegiatan kelompok, kewirausahaan, dan keterampilan teknis pembuatan proposal telah dilakukan kepada pokmas binaan itu. Kegiatan pokmas yang diusulkan antara lain pengembangan ternak kambing, ternak ayam, jasa perkiosan dan penampungan hasil komoditi perkebunan terutama jambu mete. Program ini akan segera direalisasikan dengan rencana penggalangan dana sebesar Rp20.000.000,- per kelompok.

Musim tanam tahun 2009-2010, Dinas Pertanian Kabupaten Alor telah mempersiapkan bantuan bibit dari Cadangan Benih Nasional (CBN) jagung varietas komposit sebanyak 15 ton, ditambah bantuan benih jagung dari pemerintah pusat sebanyak 7.500 kg, dan benih padi gogo 37.500 kg. Melalui tenaga PPL, sosialisasi pada masyarakat di tingkat desa terkait dengan introduksi benih jagung itu sedang dilaksanakan, dan lahan pun sedang dipersiapkan. Selain program itu, Dinas Pertanian pun sedang menjajaki kemungkinan pengembangan tanaman jagung varietas hibrida bekerja sama dengan PT. Pertani di NTT. Dalam tahun yang sama, Dinas Pertanian Propinsi NTT juga sedang merancang Sistem Pertanian Terpadu (*Mix Farming*

⁹Program yang dilakukan pada tahun 2007 sudah membentuk sebanyak 64 kelompok masyarakat (Pokmas) untuk seluruh Kabupaten Alor. Total dana bergulir yang telah disalurkan sebesar Rp737.500.000,-. Sampai tahun 2009, saldo tagihan per 31 Desember 2008 masih menunggak sebesar Rp235.714.894,- (Daftar Realisasi Industri Agroprocessing, BPMPD, 2008).

System), yaitu sistem yang memadukan ternak sapi dengan pengembangan tanaman jagung. Program ini dilakukan dalam rangka mengembalikan citra daerah NTT sebagai daerah sejuta sapi. Upaya ini dilakukan karena akhir-akhir ini populasi sapi sedang mengalami penurunan. Masyarakat petani lebih tergiur untuk mendapatkan uang tunai sehingga banyak sapi pejantan yang dijual, sementara sapi betina dijadikan sebagai kebutuhan untuk pesta adat.

Upaya untuk meningkatkan produksi tani juga dilakukan di Desa Alila, tepatnya di Dusun Beharuin. Pada tahun 2008, PT. Arta Graha bekerja sama dengan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT telah melakukan survei mengenai kemungkinan dibukanya lahan sawah berpengairan teknis seluas 400 ha. Sumber air bawah tanah akan diangkat ke permukaan tanah dengan menggunakan sumur bor, dan diperkirakan akan mampu mengairi sawah seluas 400 ha. Lahan yang sudah disurvei itu kini tinggal menunggu realisasinya. Untuk itu lahan tersebut sudah dikosongkan dan tidak lagi diperbolehkan untuk menanam tanaman keras.

Revitalisasi Pangan Lokal

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan perhatian yang tinggi terhadap diversifikasi pangan agar ketergantungan kepada makanan beras lambat laun dapat dikurangi. Mengurangi ketergantungan kepada beras ini menjadi perhatian karena dengan topografi dan iklim di Provinsi NTT tidak mungkin untuk memproduksi beras guna memenuhi kebutuhan penduduk di NTT. Perhatian itu tidak hanya sekedar slogan tetapi ditindaklanjuti dalam tingkat implementasi. Bentuk perhatian itu sangat beralasan karena Provinsi NTT selalu menjadi berita di media massa terkait seringnya daerah ini mengalami kejadian rawan pangan ataupun gizi buruk. Padahal dalam sejarahnya, NTT jarang menjadi isu nasional dalam hal kerawanan pangan. Walaupun penduduk di NTT tidak mampu untuk memenuhi kecukupan pangan jenis beras akibat kondisi iklim yang didominasi musim kering, topografi yang berbukit-bukit dengan kemiringan lebih dari 45 derajat, dan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau sehingga dari sisi distribusi sangat sulit untuk dilakukan, namun dari sisi ketahanan pangan tidak terlalu bermasalah.

Pangan dengan adanya diversifikasi itu tidak lagi dibatasi hanya beras semata. Oleh karena itu, kerawanan pangan yang sering menjadi

berita di surat kabar hanya kerawanan dalam bidang beras saja. Sebab, kalau berbicara tentang pangan secara luas sebenarnya NTT tidak mengalami kekurangan. Salah satu contoh tingkat produksi jagung sebagai makanan pokok bagi NTT mencapai 400.000 ton dalam setahun, sementara kebutuhan jagung hanya sekitar 380.000 ton. Dengan kata lain, produksi jagung mengalami surplus sekitar 20.000 ton secara keseluruhan. Hanya saja, surplus itu tidak kelihatan di pasar sebab petani jarang memperjualbelikan jagung. Jagung diutamakan oleh petani untuk kebutuhan konsumsi keluarga saja.

Jagung yang disimpan oleh petani di lumbung-lumbung pangan (*esel*) yang berbentuk kerucut dimanfaatkan sebagai persiapan kebutuhan pangan selama setahun. Lumbung pangan berbentuk kerucut itu dimaknai juga adanya pemberian prioritas dalam pemanfaatan jagung berdasarkan tingkatannya. Tingkat 1 yang berada di bagian bawah dari bangunan lumbung pangan merupakan bagian yang paling luas sehingga volume jagung pada tingkat inipun lebih banyak. Jagung yang berada di tingkat 1 ini dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi. Tingkat 2 dengan volume jagung yang lebih sedikit dari volume di bagian bawahnya adalah jagung sebagai antisipasi konsumsi apabila jagung yang berada di tingkat 1 tidak mencukupi. Adapun manfaat jagung pada tingkat 3 atau puncak dengan volume yang lebih sedikit merupakan jagung-jagung pilihan untuk dijadikan sebagai bibit. Dengan adanya prioritas, kontrol terhadap persediaan jagung menjadi teratur dan juga menjadi penting. Kalau pengonsumsian jagung sudah menyentuh pada tingkatan kedua atau berada pada kondisi antisipasi, itu berarti persediaan jagung diasumsikan tidak lagi mencukupi sampai menunggu panen jagung selanjutnya. Untuk itu, masyarakat petani harus sudah dapat menyiasatinya. Dalam hal ini, petani mempunyai strategi tersendiri untuk memperlakukan jagung tersebut. Kalau di awal-awal panen petani dapat makan jagung setiap harinya, namun memasuki masa tanam dengan persediaan jagung sudah mulai menipis, petani akan mengonsumsi jagung dikombinasikan dengan makanan pangan lainnya.

Pemerintah dalam upaya merevitalisasi pangan lokal dan dapat juga dimaknai sebagai upaya pendiversifikasian pangan, dilakukan melalui himbauan-himbauan terhadap seluruh masyarakat NTT. Sejak tahun 2007, Pemerintah Provinsi NTT telah mencanangkan "Gerakan Pemanfaatan Pangan Lokal". Gerakan itu dituangkan dalam bentuk Instruksi Gubernur Frans Leburaya, yang isinya adalah menetapkan "Hari Kamis sebagai Hari Wajib Konsumsi Pangan Lokal 3B

(Beragam-Bergizi-Berimbang) non-Beras dan non-Terigu". Tujuan dari gerakan ini agar permintaan akan kebutuhan beras berkurang, dan pada saat yang sama permintaan terhadap pangan lokal meningkat. Terhadap jajaran penyelenggara pemerintah di Provinsi NTT, himbauan ini lebih ditegaskan lagi. Pada setiap acara rapat, pertemuan dan pelatihan yang diadakan di lingkungan kerja masing-masing, dalam penyajian makanan dan *snack* supaya memanfaatkan pangan lokal. Dengan adanya himbauan ini maka pada setiap kunjungan kerja yang dilakukan oleh Gubernur NTT mengharapkan tuan rumah apabila ingin menyajikan makanan kepada gubernur dan rombongannya agar berbahan baku lokal. Kalau gubernur menerima sajian makanan yang tidak memanfaatkan pangan lokal, gubernur tidak akan mencicipinya. Hal itu dimaksudkan untuk merubah cara pandang para pimpinan di masing-masing instansi dan wilayah terhadap pangan lokal.

Himbauan yang sama juga disampaikan kepada pengusaha toko/swalayan, pengelola restoran/rumah makan, kantin sekolah guna mendukung gerakan cinta terhadap produk pangan lokal NTT. Himbauan yang disampaikan oleh gubernur antara lain: (1) Selalu menyajikan pangan lokal di setiap acara-acara/rapat/pertemuan resmi maupun tidak resmi dan di tiap rumah tangga; (2) Meningkatkan citra pangan lokal dan olahan pangan yang dihasilkan oleh *home industry* pangan, baik itu kualitas maupun kemasan produknya; (3) Turut serta mempromosikan pangan lokal dan olahan pangan lokal yang dihasilkan oleh *home industry* pangan; (4) Turut serta memfasilitasi pemasaran produk pangan segar maupun olahan yang dihasilkan oleh *home industry* pangan.¹⁰

Mimbar-mimbar keagamaan pun menjadi media pemerintah dalam mensosialisasikan himbauan ini agar terdengar sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Tokoh agama masih dianggap sebagai agen pemerintah yang efektif untuk menyampaikan himbauan ini, sehingga melalui tokoh-tokoh agama ini implementasi himbauan akan lebih cepat dilaksanakan. Generasi muda sebagai penerus dari pemanfaat pangan lokal ini juga menjadi target dari gerakan pemanfaatan pangan lokal. Kegiatan yang dilakukan pemerintah provinsi di tingkat SD, SLTP, dan SLTA dalam rangka mensosialisasikan gerakan pangan lokal ini berupa

¹⁰Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BKPP. 510.13/92/IV/2009 tanggal 27 April 2009, perihal Gerakan Mencintai Produk Pangan Lokal NTT.

lomba pengelolaan lahan sekolah dalam bentuk tanaman-tanaman pangan lokal. Selain itu, kegiatan lomba lain dengan sasaran mereka yang duduk di sekolah SLTA dan Perguruan Tinggi dalam bentuk lomba pidato terkait dengan pangan lokal.

Himbauan yang sama sebenarnya sudah dilakukan ketika Talakapeta menjabat sebagai bupati di Kabupaten Alor. Kalau himbauan Gubernur NTT hanya sekali dalam seminggu, maka himbauan dari Bupati Alor lebih tinggi lagi, yaitu 2 hari dalam seminggu kendati harinya tidak ditentukan. Ketersediaan untuk mengonsumsi pangan lokal diserahkan pada masing-masing individu. Tujuan akhir dari himbauan ini agar pengonsumsi pangan lokal membudaya di kalangan masyarakat Kabupaten Alor. Sayangnya, himbauan untuk kembali ke pangan lokal ironis dengan implementasi di tingkat lapangan. Salah satu contoh adalah pengadaan pangan untuk PNS, TNI, dan Polri serta beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) atau rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Alor justru diberikan dalam bentuk beras.

Sementara revitalisasi pada tingkat implementasi adalah membantu petani menyediakan bibit jagung kelas hibrida. Keunggulan jagung hibrida ini ada pada tingkat produktivitasnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jagung lokal. Tingkat produksi jagung hibrida dapat mencapai 6 ton per hektar karena dalam satu pohon jagung dapat menghasilkan sampai tiga bulir jagung, padahal dengan jagung lokal hanya menghasilkan satu bulir jagung saja. Namun, ketika produksi ditingkatkan ternyata persoalan baru pun ikut muncul. Kelemahan jagung hibrida ini adalah cepat rusak sehingga tidak dapat disimpan dalam waktu yang begitu lama, misalnya dijadikan sebagai persediaan pangan untuk kebutuhan setahun. Upaya untuk memasarkan jagung hibrida ini juga terbatas akibat sempitnya ruang pemasaran. Walaupun ada pasar, harga jual jagung begitu rendah menurut kalangan petani. Petani bersedia untuk melepaskan jagung kalau harga per kilogramnya sekitar Rp3.000, namun pasar hanya bersedia membelinya sekitar Rp1.500. Tidak melepaskan jagung pada harga pasar yang tersedia itu karena menurut petani harga tersebut terlalu rendah sementara harga beli bibit jagung hibrida saja sudah Rp30.000 per kilogram. Padahal, menurut hitung-hitungan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Alor, petani sebenarnya sudah menerima keuntungan lumayan dengan harga jual jagung hibrida yang Rp1.500 per kilogram.

Pemerintah Kabupaten Alor juga membuka sekolah lapang (SL) di kalangan petani. Sekolah ini adalah model pemberdayaan di kalangan petani agar proses pertanian dilakukan secara modern agar hasil yang diperoleh dapat ditingkatkan. SL ini bertanggung jawab sejak pengelolaan sampai pasca panen. Proyek percontohan yang pernah dilakukan mengambil lokasi di lahan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor seluas 0,7 ha, dengan hasil yang diperoleh sekitar 9 ton. Oleh karena pemerintah kabupaten menganggap hasil uji coba ini menggembirakan, maka sejak tahun 2005/2006, SL pun diadopsi sebagai program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat petani dengan maksud agar mereka yang menjadi anggota SL dapat menerapkan ilmu pertanian yang diperolehnya di lahan pertanian masing-masing. Sasaran dari SL ini adalah petani lahan kering mengingat para petani di Alor merupakan petani ladang berpindah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi jagung sebagai pangan lokal utama bagi penduduk di Kabupaten Alor. Luas lahan yang dikelola oleh kelompok yang terlibat dalam SL ini mencapai 1 ha dengan lokasi yang berpencar. Tingkat produksi jagung kering dari lahan yang dikelola oleh kelompok SL ini dapat mencapai 5 ton per hektar.

Suksesnya pemberdayaan petani sangat tergantung pada kehadiran tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL). Namun, untuk wilayah Kabupaten Alor, jumlah tenaga PPL ini masih sangat kurang, sebab tidak semua desa di Kabupaten Alor memiliki tenaga PPL. Jumlah tenaga PPL di Kabupaten Alor adalah 121 orang, sebanyak 65 orang di antaranya tenaga kontrak sementara jumlah desa ada sebanyak 174 desa. Timpangnya tenaga penyuluh di tingkat kabupaten dengan membandingkan jumlah penyuluh terhadap seluruh desa, maka akan lebih timpang lagi bila ditelusuri di tingkat kecamatan sebagaimana terjadi di Kecamatan Alor Barat Daya, misalnya. Jumlah tenaga PPL di kecamatan dengan 19 desa dan 1 kelurahan ini hanya dilayani oleh 5 orang penyuluh dengan rincian; 2 orang tenaga penyuluh untuk lahan basah dan 3 orang tenaga penyuluh untuk lahan kering. Artinya, kebutuhan tenaga penyuluh belum sesuai dengan kondisi riil suatu wilayah. Padahal, setiap desa idealnya memiliki seorang tenaga PPL agar tugas yang diembannya lebih terfokus dalam memberdayakan masyarakat petani.

Selain jumlah tenaga PPL yang masih kurang, tenaga PPL yang ada itupun tidak seluruhnya terpanggil sebagai tenaga PPL. Kondisi yang demikian tidak saja hanya di Kabupaten Alor tetapi menyeluruh di

Provinsi NTT. Nikolaus menyebutkan bahwa sebagian besar tenaga penyuluh di NTT tidak memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan. Penyuluh pertanian yang profesional adalah penyuluh yang mampu dan berhasil mengajak, mendorong dan mengajar petani untuk menerima dan menerapkan teknologi yang dianjurkan kepadanya (Nikolaus 2009: 125). Oleh karena itu, pendampingan dari tenaga PPL harus terus menerus dilakukan agar bantuan maupun program yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Dengan demikian, kasus seperti yang dialami oleh petani di Desa Pintumas, Kecamatan Alor Barat Daya misalnya, tidak terulang. Petani di desa itu suatu waktu mendapat bantuan pupuk urea dari pemerintah. Namun, petani penerima pupuk urea itu tidak dilatih bagaimana cara memupuk tanamannya, karena begitu bantuan diberikan, pemberi bantuan langsung meninggalkan Desa Pintumas. Petani Pintumas tidak terbiasa menggunakan pupuk untuk bercocok tanam, sehingga mendengar ada pupuk mereka berasumsi bagaimana pun cara menggunakannya pasti membuat tanamannya menjadi subur. Ternyata, begitu pupuk ditabur pada tanaman jagung dan padi ladangnya, beberapa hari kemudian jagung yang ditanam justru mati. Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan mengakibatkan petani kecewa dan juga merugi, sehingga pupuk urea yang masih tersisa pun dibuang ke sungai. Itu berarti, tujuan pemberi bantuan tidak tercapai di satu sisi, dan petani pun tidak terbantu di sisi lain.

Dengan kejadian di Desa Pintu Mas itu diharapkan tenaga PPL tidak hanya sekedar memberikan pelatihan, tetapi yang lebih penting dari itu tenaga PPL mengimplementasikan ilmu yang disosialisasikan itu di sekitar tempat tinggalnya. Untuk itu, tenaga PPL akan lebih baik kalau bermukim di tengah-tengah masyarakat yang ada di desa tempatnya mengabdikan. Apabila ia berhasil mengimplementasikan ilmu pertanian yang disosialisasikan itu di tempat tinggalnya, itu menjadi media sosialisasi yang lebih ampuh. Dengan kata lain, kehadiran fisik seorang tenaga penyuluh sangat diharapkan di tengah-tengah petani sepanjang kegiatan pertanian berlangsung. Karena dengan kehadiran yang demikian, setiap ada permasalahan yang dihadapi petani dalam melakukan pertaniannya, petani dapat menyampaikan permasalahannya kepada tenaga penyuluh dengan harapan tenaga penyuluh memberikan jawaban atau solusi.

Penutup

Pemerintah Kabupaten Alor sadar bahwa ketergantungan pangan hanya kepada beras akan menimbulkan masalah. Selain budaya pertanian yang masih tradisional sehingga kurang mampu untuk meningkatkan produksi karena lahan-lahan di kabupaten ini kurang cocok dijadikan sebagai daerah pertanian, adalah juga kondisi cuaca yang belum dapat disiasati kendati keadaan itu sudah ratusan tahun berlangsung. Realitas itu mengakibatkan kebutuhan pangan terutama beras sangat tergantung pada pasokan dari luar Pulau Alor, bahkan bahan pangan tersebut harus didatangkan dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan kata lain, dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan beras, masyarakat harus memperolehnya dengan cara membeli, padahal penduduk di Kabupaten Alor terutama petani merupakan masyarakat miskin.

Kesadaran Pemerintah Alor terhadap produktivitas pertanian di Kabupaten Alor mengakibatkan program-program bantuan sering diberikan. Hanya saja, dampak dari bantuan yang diberikan kepada penduduk desa dalam rangka pemberdayaan mengakibatkan sifat paternalistik terhadap pemerintah ataupun bantuan-bantuan yang diberikan oleh lembaga lain. Penerima bantuan menjadi buta terhadap kebutuhan untuk memecahkan masalah sendiri, karena ia tidak bekerja untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tetapi berpartisipasi sekedar untuk mendapatkan hadiah atau bantuan yang dimaksud. Partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah sangat rendah dan cenderung menciptakan segregasi di antara masyarakat antara penerima dan yang tidak menerima bantuan. Inovasi pada masyarakat yang sering dibantu ini kurang dapat berkembang karena tingginya sifat fatalistik, bahkan kepercayaan terhadap "tahun genap dan tahun ganjil" atau dengan istilah lain "tahun tikus dengan tahun tidak tikus" masih sangat tinggi. Suara para tokoh agama yang disampaikan lewat mimbar khotbah tidak mampu untuk menegasikan kepercayaan yang sudah mengakar itu. Dengan kepercayaan terhadap mitos yang masih begitu kuat mengakibatkan produktivitas pertanian kurang dapat ditingkatkan ditambah dengan topografi dan iklim yang kurang cocok dijadikan sebagai daerah pertanian.

Memberi bantuan langsung kepada petani merupakan sesuatu yang baik. Akan tetapi dengan adanya dampak ikutannya, pemberian bantuan langsung seperti raskin sudah harus dipertimbangkan. Raskin

telah menggeser keberadaan pangan lokal sehingga ke depannya pemberian bantuan pangan harus didasarkan pada makanan pokok masing-masing daerah agar pangan lokal tidak sampai ditinggalkan. Menghidupkan jenis bantuan pangan berupa sagu, jagung, singkong, dan ubi sudah harus dipikirkan, selain untuk mengangkat nilai ekonomi bahan pangan lokal tersebut juga menghindari ketergantungan kepada salah satu jenis pangan saja.

Selanjutnya, modal sosial yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat menjadi terganggu dengan hadirnya berbagai bantuan apalagi distribusinya tidak merata. Kontradiksi dengan partisipasi atau sifat gotong royong yang ada di antara masing-masing anggota masyarakat ketika menerima bantuan, terjadi pada program-program pemerintah yang digerakkan oleh kepala desa. Program-program yang membutuhkan partisipasi masyarakat kurang berjalan dengan baik. Hilangnya sifat gotong royong terhadap program-program pemerintah merupakan dampak dari bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Penyebabnya adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak merata, di satu sisi ada masyarakat yang mendapat bantuan, di sisi lain ada kelompok masyarakat yang tidak mendapatkannya. Realitas penerima bantuan yang tidak merata ini mengakibatkan di antara masyarakat yang bermukim di satu desa timbul kecemburuan dari kelompok yang bukan penerima bantuan kepada penerima bantuan. Akibatnya himbauan kepala desa kepada masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi pada program-program pemerintah sering dijawab dengan sinis. Kelompok masyarakat yang tidak menerima bantuan mengemukakan agar program pemerintah yang menjadi program desa itu dikerjakan oleh kelompok masyarakat penerima bantuan saja. Dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat seperti itu, teridentifikasi bahwa kohesi sosial untuk melakukan kegiatan bersama demi kepentingan umum sudah mulai longgar akibat hadirnya bantuan-bantuan pemerintah yang tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

Aswatini, H. Romdiati, B. Setiawan, A. Latifa, Fitranita dan M. Noveria. 2004. *Ketahanan Pangan, Kemiskinan, dan Sosial Demografi Rumah Tangga*. Jakarta: PPK-LIPI.

- BPS Kab. Alor. 2003. *Statistik Pertanian Kabupaten Alor 2003*. Alor: BPS Kab. Alor.
- _____, 2004. *Alor Dalam Angka 2004*. Alor: BPS Kab. Alor.
- Birowo, T., K.H. Junghans, dan U, Scholz. 1993. "Bentuk-bentuk Pengorganisasian Produksi Pertanian", dalam U. Planck (Penyunting) *Sosiologi Pertanian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 68-122.
- Haba, John. 2009. "Kebijakan Pangan, Ketahanan Pangan, dan Strategi Lokal di Kabupaten Alor", dalam R. Siburian (Editor) *Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Daerah*. Jakarta: LIPI Press. Hlm. 159-186.
- Iskandar, Johan. 2006. "Metodologi Memahami Petani dan Pertanian", dalam *Jurnal Analisis Sosial*. Bandung: AKATIGA. 11(1).
- Kidnesia. 2010. "Upacara Adat Reba: Gabungan Upacara Adat dan Agama di Kab. Ngada", dalam <http://kidnesia.com>. (Diunduh tanggal 2 September 2010).
- Kompas. 2007. "Impor Beras Tetap Akan Dipaksakan", dalam *Kompas*, Kamis, 13 Oktober. Hal. 17.
- _____, 2007. "Tradisi Reba, Bukan Sekedar Reuni" dalam *Kompas*, 12 Februari. Hal. 40.
- Purwantini, Tri B., Ariani, M., dan Marisa, Y. t.t. "Analisa Kerawanan Pangan Wilayah dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan (Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur)", dalam <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/mono26-4.pdf> (Diunduh tgl. 21 April 2009).
- Rungkat-Zakaria, Fransiska. 2006. "Ketahanan Pangan sebagai Wujud Hak Asasi Manusia atas Kecukupan Pangan", dalam B. Krisnamurti (Tim Editor) *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hlm. 236 – 270.
- Santosa, Dwi Andreas. 2004 "Bioteknologi Pertanian, Harapan bagi Si Miskin". Dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/04/ilpeng/1183488.htm>, 24 Agustus. (Diunduh tanggal 14 Oktober 2005).

Welirang, F. 2006. "Jalan Tengah Sempurna Ketahanan Pangan Indonesia Tepung Sebagai Solusi Pangan Masa Depan", dalam B. Krisnamurti (Tim Editor) *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hlm. 182 – 202.